

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Telah diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di mana tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Seperti halnya dengan pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat propinsi adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Jenis-jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten/kota adalah :

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Robinson Tarigan (2004:63) Pajak yang dipungut dari masyarakat terbagi atas pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang

dipungut oleh pemerintah propinsi, dan pajak yang dipungut pemerintah kota atau kabupaten.

Dalam perekonomian ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Surakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2005 sebesar 62,6 milyar, dan terus meningkat menjadi 96,1 milyar pada tahun 2008 sedangkan pada tahun 2012 bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan merupakan angka yang sangat besar kenaikannya yaitu sebesar 231,6 milyar.

Sedangkan penerimaan pajak dan retribusi daerah Surakarta juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak daerah pada tahun 2006 sebesar 35,7 milyar dan naik menjadi 61,6 milyar pada tahun 2010. Kenaikan ini juga terlihat pada penerimaan retribusi daerah yang mengalami kenaikan dari 28,5 milyar pada tahun 2006 menjadi 41,5 milyar pada tahun 2010 (BPS Surakarta 2006-2012). Dari gambaran tersebut, penelitian ini akan meneliti Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Surakarta dari tahun 1991-2012.

Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota Surakarta secara lengkap dari tahun 1991-2012 sebagaimana tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1-1

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1991	8,938,104,438	2,659,855,844	5,875,812,906
1992	9,358,023,969	2,705,220,063	6,234,320,906
1993	10,364,958,656	3,145,696,625	6,735,114,156
1994	12,017,538,344	4,256,452,125	7,453,305,000
1995	14,685,441,219	5,572,749,469	8,611,414,656
1996	16,684,631,531	6,257,017,125	9,467,610,125
1997	18,200,110,969	7,008,769,750	10,021,636,469
1998	17,712,116,031	7,621,404,281	8,788,450,219
1999	17,176,771,031	7,932,256,063	8,080,304,875
2000	25,554,372,375	10,919,046,750	11,823,014,625
2001	34,409,422,200	15,818,667,000	15,734,100,000
2002	44,037,437,802	20,450,000,000	20,967,283,197
2003	53,256,482,905	24,194,000,000	26,280,114,000
2004	59,026,921,408	27,395,764,287	28,485,132,866
2005	62,602,084,457	28,264,398,621	28,562,693,200
2006	78,637,865,549	35,702,606,284	31,738,906,507
2007	88,034,379,000	39,465,953,000	33,969,651,000
2008	96,199,901,000	45,781,000,000	35,575,696,100
2009	101,972,318,682	52,163,818,689	37,783,489,120
2010	113,946,007,541	61,621,623,410	41,588,097,172
2011	181,096,816,152	118,816,234,506	47,671,386,160
2012	231,672,100,429	151,905,454,913	55,056,791,081

Sumber : BPS Surakarta

B. Rumusan Masalah

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa sumber PAD yang sangat potensial diantaranya yaitu pajak dan retribusi daerah. Adapun perumusan masalah yang telah diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD) di Surakarta

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap instansi terkait untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penentu kebijaksanaan khususnya bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Membawa wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar belakang
	B. Perumusan masalah
	C. Tujuan penelitian
	D. Manfaat penelitian
	E. Metode penelitian
	F. Sistematika penulisan
BAB II	LANDASAN TEORI
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	B. Pajak Daerah
	C. Retribusi Daerah
	D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	E. Pengeluaran Pemerintah
	F. Penelitian Terdahulu
	G. Hipotesisi
BAB III	METODE PENELITIAN
	A. Jenis Data
	B. Sumber Data
	C. Definisi Operasional Variabel

D. Model dan Alat Regresi

E. Uji Asumsi Klasik

F. Uji Statistik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

B. Analisis Hasil Estimasi

C. Asumsi Klasik

D. Interpretasi Ekonomi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN